

“Arisan Air” Kota Kembang

Musim hujan identik dengan banjir tidak terkecuali kota Bandung. Walaupun kota Bandung merupakan wilayah yang bisa dikatakan tinggi dengan ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Namun tetap saja banjir melanda wilayah ini. Banjir kali ini berada di wilayah Pasteur yang menjadi salah satu pintu masuk utama kota Bandung. Banjir tersebut telah memakan 1 korban jiwa (<http://www.cnnindonesia.com>, 24/10/16) selain itu membuat kerugian materil yang diperkirakan nilainya sebesar Rp. 16 Miliar (regional.kompas.com, 25/10/16). Bahkan stasiun Bandung pun tidak lepas dari terjangan banjir pada 13 November 2016 lalu yang mengakibatkan penundaan keberangkatan dan kedatangan kereta ke stasiun Bandung.

Pembangunan di Bandung

Selain disebabkan hujan lebat yang terjadi di wilayah Bandung, drainase yang kurang baik menjadi salah satu penyebabnya. Namun bila ditelisik lebih lanjut ada penyebab lain yaitu kerusakan daerah hulu. Kawasan Bandung Utara sebagai daerah hulu yang seharusnya menjadi kawasan lindung sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Panataan Tata Ruang di Kawasan Bandung Utara, namun kini sudah berubah fungsi menjadi hunian dan komersil. Banyak hunian, restoran dan hotel yang berdiri didaerah tersebut.

Kawasan Bandung Utara memang menjadi tempat yang sangat potensial dalam hal perekonomian karena kawasan ini mempunyai keindahan alam, udara yang sejuk serta akses yang mudah. Sehingga menarik para wisatawan untuk mendatanginya dan mendorong para investor untuk membangun daerah tersebut hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Disatu sisi pembangunan memang baik dari segi ekonomi namun jangan sampai mengabaikan alam. Ada baiknya dalam melakukan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Membangun Sesuai Aturan

Banjir mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya namun dapat diminimalisir dampaknya dengan beberapa cara seperti pemerintah kota Bandung dapat melakukan perbaikan drainase dan mempercepat pembuatan tol air ataupun melakukan penertiban bangunan disekitar aliran sungai.

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal pembuatan kebijakan. Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk hal penetapan zonasi ataupun perencanaan tata ruang. Dengan demikian kebijakan yang diambil oleh Pemerintah setempat merupakan kebijakan yang *sustainable* dengan memperhatikan pembangunan dan keseimbangan alam secara berkesinambungan. Selain penetapan zonasi dan perencanaan tata ruang dapat juga berkoordinasi untuk menghentikan sementara pemberian izin pembangunan Kawasan Bandung Utara serta melakukan evaluasi kesesuaian fisik bangunan dengan IMB didaerah tersebut.

Sebagai regulator, Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan pembangunan tidak hanya dari sisi ekonomi saja namun juga dari aspek daya dukung alam termasuk kelestarian alam. Jika kelestarian lingkungan terjaga dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan maka masyarakat akan hidup dengan lebih berkualitas. Berkualitas dari sisi ekonomi, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

@Ratno Budihartono



PUSAKA
November 2016